

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi tiap perseroan, laporan finansial sangatlah berguna untuk kebutuhan internal ataupun eksternal industri yang memaparkan situasi finansial industri dan dalam menentukan pengambilan keputusan. Industri mempunyai peranan buat menyuguhkan informasi finansial sesuai ketentuan yang sudah dipastikan oleh badan yang berhak di Indonesia yakni OJK “Otoritas Jasa Keuangan”.

Manajer memiliki andil yang amat berarti dalam industri sebab mereka mengendalikan perkembangan laporan finansial serta kapasitas industri. Kemampuan industri bisa diukur serta dievaluasi dari keahlian industri buat menggapai ataupun mengoptimalkan profit. Buat membuktikan kemampuan yang bagus dalam menghasilkan angka ataupun keuntungan yang maksimum untuk industri, manajemen mengarah memilah serta mempraktikkan metode akuntansi yang bisa membagikan data keuntungan yang lebih bagus.

Dalam teori keagenan, ketika pemilik (pemegang saham) selaku principal mempekerjakan manajer sebagai agen, serta kemudian mendelegasikan kekuasaan pengumpulan ketetapan pada agen, maka terjadi keterkaitan keagenan. Sebagai manajer industri, manajer perihal data internal serta prospek masa depan industri lebih baik daripada pemegang saham. Dari sebab itu, selaku manajer mempunyai kewajiban guna memberikan tanggung jawab pada pemilik mengenai kondisi industri. Pertanggungjawaban manajer ini dituangkan dalam informasi yang berupa laporan keuangan. Tetapi sering-kali data yang diterima investor tidak selaras dengan keadaan industri semestinya. (Ujiyanto & Pramuka, 2007)[1]. Perihal tersebut dilakukan olehh manajer industri dengan memanfaatkan celah – celah kelemahan dalam standar akuntansi. Manajemen laba dilakukan oleh manajer atas dasar aspek industri, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual (Kurniawati & Rahmawati, 2014)[2].

SFAC “*Statement of Financial Accounting Concept*” No. 1 menjelaskan bahwa informasi laba membantu pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan kekuatan laba di masa depan. Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menilai kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Maka manajemen cenderung menyajikan laporan keuangan yang menarik. Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat meminimalisir dengan menerepkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri. Pengukuran manajemen laba pada industri perbankan ini menggunakan model khusus yaitu *beaver* (1996) dengan menggunakan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Salah satu kasus manajemen laba dalam dunia perbankan terdapat pada Bank Bukopin dimana OJK menemukan temuan mengenai *restated* laporan keuangan dengan merevisi turunnya laba bersih pada laporan keuangan tahun 2016 menjadi Rp 183,536 miliar dari Rp 1,08 triliun. Laba bersih Bank Bukopin telah anjlok 81% dibandingkan dengan seatahan sebelumnya. Penurunan terbesar terdapat di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. Revisi ini menyebabkan pendapatan turun lebih

dari Rp 743 miliar. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak industri Bank Syariah Bukopin (BSB) terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Sebelum OJK melakukan klarifikasi, Bank Bukopin sesungguhnya telah “dihukum” atas kejadian tersebut. Revisi juga terjadi pada total kredit dan pembiayaan syariah dari sebelumnya Rp 72,47 triliun, turun Rp 1,9 triliun menjadi Rp 70,56 triliun. Total asset juga mengalami revisi turun sebesar Rp 2,62 triliun menjadi Rp 102,78 triliun dari sebelumnya Rp 105,4 triliun. Bank Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp 9,53 triliun menjadi Rp 6,91 triliun. Penurunan total ekuitas dipengaruhi oleh revisi saldo laba sebesar Rp 2,62 triliun menjadi Rp 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. Akibat terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen maka dapat menghancurkan sistem ekonomi, aturan etika dan moral. Kemudian publik atau investor meragukan etika, moral dan tanggung jawab para pelaku bisnis yang seharusnya dapat memberi contoh kehidupan bisnis yang berintegritas.

Adapun fenomena lain yang dapat kita lihat pada tabel 1.1, dimana terdapat penurunan laba akibat adanya kegiatan manajemen laba pada beberapa bank konvensional (Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN dan Bank UOB Indonesia) pada tahun 2020. Penurunan laba bersih ini terjadi karena adanya peningkatan pencadangan, kredit dan pembiayaan karena kualitas yang memburuk.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Laba/Rugi Perbankan di Indonesia Tahun 2016-2020**  
(Dalam rupiah)

Kode Saham	2016	2017	2018	2019	2020
BBTN	2,6 T	3 T	2,8 T	209 M	1,6 T
BNI	1,6 T	1,4 T	1,8 T	1,4 T	918 M
BNLI	-6,5 T	738 M	898 M	1,5 T	724 M
BTPN	1,5 T	752 M	1,1 T	1,6 T	1,4 T
BBIA	479 M	78 M	511 M	666 M	518 M

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Semacam yang dipaparkan oleh Tabel 1. 1 di atas dari ke 5 (lima) bank konvensional tersebut yang mengalami penurunan laba yang sangat signifikan di alami oleh Bank BTN dengan kode saham BBTN tersebut yaitu di tahun 2018 laba bersih sebesar Rp 2,8 triliun turun menjadi Rp 209 miliar pada tahun 2019 mengalami penurunan laba yang sangat signifikan sebesar 92%. Pendapatan bunga Bank BTN sebesar Rp25,6 triliun, meningkat dari Rp22,81 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, beban bunga bertambah dari Rp 12,62 triliun di tahun 2018 jadi Rp 16,54 triliun. Pendapatan bunga bersih Bank BTN pada tahun 2019 sebesar 9,08 triliun rupiah, turun 12,41% dibandingkan tahun 2018.

Dengan adanya fenomena manajemen laba yang di timbul dalam dunia perbankan ini menyebabkan efektivitas dari penerapan tata kelola industri pun dipertanyakan. Manajemen laba dipengaruhi oleh Sebagian aspek salah satunya adalah penerapan tata kelola industri atau *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan industri

yang di harapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai industri kepada para pemegang saham. (Herman Darwis, 2010)[3]. Penerapan tata kelola industri ini jadi penilaian bagi investor dalam menanamkan investasi mereka. Hal ini karena tata kelola industri merupakan rancangan yang diusulkan yang bertujuan buat tingkatkan kemampuan industri dengan memantau ataupun memantau kemampuan manajemen serta untuk membenarkan tanggung jawab manajemen pengelola kebutuhan bersumber pada kerangka peraturan. (Widyaningsih, 2017)[4]. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di industri bermaksud buat tingkatkan serta meningkatkan angka industri, mengatur pangkal energi serta resiko dengan cara lebih efisien serta berdaya guna, memperkuat patuh serta tanggung jawab institusi industri, serta meningkatkan kontribusi industri terhadap industri. ekonomi Nasional.

Mekanisme industri yang membantu terwujudnya *good corporate governance* (GCG) terdiri dari kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Dalam menerapkan konsep *good corporate governance* yang baik, maka gcg memiliki prinsip TARIF yang mendasari yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Industri yang mengaplikasikan gcg harus berpedoman terhadap 5 prinsip tersebut karena mempunyai tujuan untuk memberikan kemajuan pada industri. Kelima bagian ini amat berarti sebab aplikasi prinsip- prinsip GCG dengan cara tidak berubah- ubah teruji bisa tingkatkan mutu peliputan finansial. Informasi finansial ini menolong penanam modal, kreditur, calon penanam modal serta konsumen informasi finansial yang lain buat membuat ketetapan pemodal, ketetapan angsuran, analisa saham serta memastikan peluang industri di era depan.

Salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance* yakni *Transparency* (keterbukaan informasi). Industri harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi dalam penelitian ini di wakili oleh kepemilikan intitusional yaitu kepemilikan saham suatu industri oleh institusi atau lembaga seperti industri asuransi, bank, industri investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendesak peningkatan pengawasan yang lebih maksimal alhasil keberadaannya amat berarti untuk pengawasan manajemen (Erick *et al.*, 2016)[5].

**Tabel 1.2**

**Kepemilikan Institusional pada Lima Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020**

(Dalam rupiah)

No	Kode	Kepanjangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBTN	Bank BTN	0,999955	0,999984	0,999861	0,999913	0,999863
2	BNII	Bank Maybank	1	1	1	1	1
3	BNLI	Bank Permata	1	1	1	1	1
4	BTPN	Bank BTPN	0,993609	0,988301	0,990692	1	1
5	BZIA	UOB Indonesia	1	1	1	1	1

Sumber : idx.co.id

Tabel 1.2 merupakan jumlah kepemilikan institusional di beberapa industri perbankan yaitu, Bank Maybank, Bank Permata dan UOB Indonesia memiliki jumlah kepemilikan institusional yang sama yaitu sebesar 1 setiap tahunnya. Bank BTPN juga jumlah kepemilikan institusional nya sebesar 1 dari 2019-2020.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan bentrok keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Kehadiran penanam modal institusi dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manejer. Kepemilikan institusional berperan untuk mengawasi manajer dalam pengawasan pengurusan industri sehingga manajer tidak melakukan tindakan atau keputusan yang merugikan pemilik ataupun pemegang saham.(Widyaningsih, 2017)[6].

Tetapi berlainan dengan hasil riset yang dicoba oleh (Hartanto & Nugrahanti, 2017)[7] tunjukkan bahwa kepemilikan intitusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba industri. Kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Semakin tinggi kepemilikan institusional mengindikasikan adanya monitoring dari pihak luar yang semakin ketat sehingga pihak industri akan semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan praktik manajemen laba.

Selain transparansi, aspek kedua yang pengaruhi manajemen laba adalah Akuntabilias (*accountability*). Menurut KNKG (2006) dalam (Kelvianto & Mustamu, 2018)[8]. Industri wajib bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh sebab itu, industri harus dikelola secara pas, terukur, dan searah dengan kebutuhan industri dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas ialah prasyarat yang dibutuhkan buat menggapai kemampuan yang berkepanjangan.

Akuntabilitas pada penelitian ini diwakilkan oleh dewan direksi yang bertanggung jawab oleh pengurusan industri. Dewan harus mentaati perhitungan dasar industri serta peraturan hukum yang legal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perihal ini dewan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad bagus serta melakukan tugasnya dengan bagus. Dewan merupakan badan industri yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan industri cocok dengan perhitungan dasar industri buat menciptakan visi serta tujuan industri yang dituangkan dalam RJPP serta RKAP. Badan badan dinaikan serta diberhentikan oleh RUPS. Sistem pertanggungjawaban dewan pada RUPS ialah bayangan dari sistem akuntabilitas pengurusan industri yang dilatarbelakangi oleh aplikasi prinsip-prinsip GCG. (Irlane Maia De Oliveira, 2017)[9]. Dewan direksi paling kurang terdiri dari 2 orang anggota direksi.

Berikut ini tabel jumlah dewan direksi pada lima industri perbankan yang terdaapat di Bursa Efek Indonesia yaitu :

**Tabel 1.3**

**Jumlah Dewan Direksi pada lima industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2016 - 2020**

No.	Kode	Kepanjangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	BBTN	Bank BTN	8	8	10	8	8
2.	BNII	Bank Maybank	8	5	8	8	8
3.	BNLI	Bank Permata	10	9	9	8	9
4.	BTPN	Bank BTPN	7	7	5	9	10
5.	BBIA	UOB Indonesia	6	6	6	7	7

Sumber : idx.co.id

Table 1.3 merupakan jumlah dewan direksi pada lima industri perbankan yang terdaftar di BEI yang jumlahh direksi berjumlah lebih dari 2 yaitu Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN, UOB Indonesia. Dengan jumlah di direksi yang lebih dari 2 orang itu dapat dilakukan pengawasan dengan baik terhadap jalannya industri.

Kehadiran direksi mempunyai tugas yang penting dalam industri serta bisa kurangi bentrokan keagenan. Dewan direksi bisa kurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer dan pemegang saham sebab mempunyai fungsi pengawasan manajer dan pelaporan langsung oleh direksi kepada pemegang saham. Dewan direksi diukur dengan jumlah direksi diindustri.

Hasil penelitian (Oktaviani, 2015)[10] menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Perihal ini disebabkan ukuran dewan direksi tidak sanggup menjamin keberhasilan dalam melaksanakan fungsi guna monitoring kepada kinerja manajemen. Besar kecilnya jumlah direksi, tidak bisa kurangi praktik manajemen laba.

Aspek ketiga yang pengaruhi manajemen laba adalah *Responsibilitas (Responsibility)*. Dalam prinsip tanggungjawab, industri wajib menaati peraturan perundang-undangan serta penuhi tugas terhadap warga dan lingkungan sehingga dapat menjalankan industri dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. *Responsibilitas* dalam penelitian ini diwakilkan oleh dewan komisaris. (KNKG,2011)[11].

Dewan komisaris merupakan orang perseroan yang bertugas dalam melakukan pengawasan secara umum atau khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.(Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007)[12]. Jumlah dewan komisaris yang dibutuhkan tergantung pada jenis industri yang digeluti perusahaan, namun jika jumlah pengawas terlalu banyak dapat menyebabkan kinerja perusahaan menurun karena kesulitan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 perihal “Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum” diatur yakni bank harus memiliki anggota Dewan Komisaris dengan mempunyai 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

**Tabel 1.4**

**Jumlah Dewan Komisaris pada lima industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2016 - 2020**

No.	Kode	Kepanjangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	BBTN	Bank BTN	7	7	6	6	6
2.	BNI	Bank Maybank	6	5	6	6	6
3.	BNLI	Bank Permata	8	8	8	8	8
4.	BTPN	Bank BTPN	5	5	5	5	5
5.	BBIA	UOB Indonesia	6	6	6	6	6

Sumber : idx.co.id

Pada tabel 1.4 merupakan jumlah dewan direksi pada lima industri perbankan yang terdaftar di BEI yang jumlah komisaris berjumlah lebih dari 3 orang yaitu Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN, UOB Indonesia. Bank Permata memiliki jumlah dewan komisaris paling banyak dalam 5 tahun terakhir yaitu sebanyak 8 orang. Keberadaan komisaris berfungsi adanya kemungkinan pengurangan dalam kecurangan terhadap laporan keuangan. Komisaris juga dapat pengaruhi pihak manajemen dalam menata informasi finansial yang bermutu yang bisa kurangi peluang mengurangi kesempatan dalam praktik manajemen laba.

Menurut hasil penelitian (Oktaviani, 2015)[13] menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari (Nasution & Setiawan, 2007)[14] menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar proporsi dewan komisaris maka semakin mengurangi manajemen laba dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, sehingga menghambat keleluasan manajer untuk melakukan manajemen laba.

Aspek yang bisa pengaruhi manajemen laba yaitu Independensi (*Independency*). Industri wajib dikelola secara independen sehingga masing – masing organ industri tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini prinsip independensi ini di wakikan oleh Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari total modal industri yang dikelola.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Kepemilikan Manajerial pada lima industri Perbankan**  
**di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020**

No.	Kode	Kepanjangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	BBTN	Bank BTN	0	0	0,000138	0	0
2.	BNII	Bank Maybank	0	0	0	0	0
3.	BNLI	Bank Permata	0	0	0	0	0
4.	BTPN	Bank BTPN	0,006390	0,006390	0,009307	0	0
5.	BBIA	UOB Indonesia	0	0	0	0	0

Sumber : idx.co.id

Pada tabel 1.5 merupakan jumlah kepemilikan manajerial pada 5 industri perbankan yaitu Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN dan UOB Indonesia. Terdapat 3 bank yang tidak ada kepemilikan manajerial sama sekali selama 5 tahun berturut – turut yaitu Bank Maybank, Bank Permata dan UOB Indonesia.

Kepemilikan Manajerial dapat membantu memastikan peraturan serta ketetapan kepada metode akuntansi yang hendak di lakukan dalam industri yang di mengurus. Kepemilikan saham dari pihak manajemen mengarah pengaruhi aksi manajemen keuntungan. (Fanani, 2014)[15]. Kepemilikan Manajerial dapat di ukur dengan jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham yang beredar. Hal ini karena manajer tersebut juga merupakan pemegang saham sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan tidak akan merugikan industri seperti melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian (Widyaningsih, 2017)[16] menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial pengaruhi positif terhadap manajemen laba. Semakin besar tingkat kepemilikan saham manajer dalam sebuah industri akan menyebabkan manajer tersebut tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham.

Faktor terakhir yang mempengaruhi manajemen laba dalam penerapan mekanisme GCG yaitu Keadilan. Perusahaan harus dapat mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta mencermati kebutuhan pemegang saham utama, kecil, menengah dan pengelola kebutuhan yang lain. Kewajaran dalam penelitian ini di wakikan oleh komite audit. Komite audit minimal 3 anggota dari komisaris serta pihak selain emiten ataupun industri tercatat. Karena terus menjadi besar ukuran panitia audit, terus menjadi kuat peran pengawasan panitia audit kepada manajemen industri.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Komite Audit pada 5 (lima) Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia**  
**Tahun 2016-2020**

No.	Kode	Kepanjangan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	BBTN	Bank BTN	5	6	6	4	4
2.	BNII	Bank Maybank	4	3	3	3	3
3.	BNLI	Bank Permata	4	3	4	4	4
4.	BTPN	Bank BTPN	4	4	4	3	4
5.	BBIA	UOB Indonesia	3	3	3	3	3

Sumber : idx.co.id

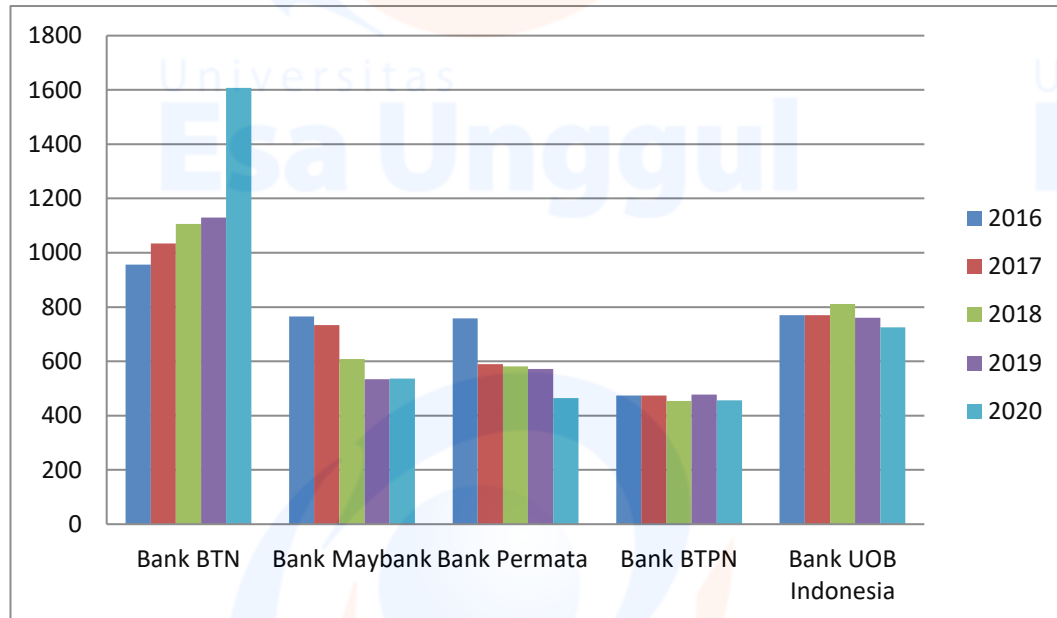
Pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa jumlah komite audit pada 5 bank yaitu Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN dan UOB Indonesia. Komite audit merupakan komite yang di susun oleh dewan komisaris yang berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas nya serta bertanggung jawab. Bank yang membentuk komite audit akan cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba karena auditor akan bersifat independen dan objektif dalam penilaian laporan keuangan. Adanya komite audit akan membuat manajer lebih berhati – hati dalam pembuatan keputusan sehingga dapat meminimalkan praktek manajemen laba. (IKAI, 2015)[17].

Hasil riset yang diteliti oleh (Oktaviani, 2015)[18] disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Karena komite audit hanyalah bentuk kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Berlawanan dengan hasil riset oleh (Rahmat, 2018)[19]. menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba di karenakan semakin banyak komite audit maka akan adanya pengawasan yang lebih efektif pada manajemen industri.

Aspek lain yang pengaruhi manajemen laba yaitu Struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan jangka panjang yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. (Hartanto & Nugrahanti, 2017)[20]. Struktur modal sangatlah penting bagi industri karena menyangkut kebijakan industri dalam menggunakan sumber dana. Dalam penelitian ini struktur modal dapat di ukur dengan proksi *Debt To Equity* (DER) yang merupakan perbandingan total hutang di miliki oleh industri dengan modal sendiri. Berikut grafik DER pada 5 industri perbankan yaitu :



**Gambar 1.1**  
**Grafik DER pada 5 (lima) Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia**  
**Tahun 2016 – 2020**



Sumber: idx.co.id

Pada gambar 1.1 grafik *Debt To Equity* (DER) diatas pada Bank BTN, Bank Maybank, Bank Permata, Bank BTPN dan Bank UOB Indonesia mengalami pergerakan secara fluktuatif terhadap struktur modal yang di proksikan dengan DER menunjukkan hasil yang fluktuatif pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Struktur modal industri melukiskan rasio perbandingan antara hutang serta modal ekuitas yang dipakai oleh industri. Terus menjadi besar DER hingga terus menjadi besar pula resiko yang wajib dialami industri, sebab pemakaian hutang selaku pangkal pendanaan jauh lebih besar dari modal sendiri. Semakin besar resiko keuangan yang ditanggung perusahaan maka mengakibatkan terjadinya penurunan laba. Hal ini dapat mendorong pihak manajemen untuk terlibat dalam praktik manajemen laba karena industri harus membayar dividen kepada para pemegang saham dengan laba yang diperoleh.

Hasil riset yang diteliti oleh (Yosofizadeh & Karimi, 2017)[21] memaparkan yakni struktur modal tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, serta sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto & Nugrahanti, 2017)[22] menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan antara *debt to equity ratio* dengan manajemen laba. Perihal ini disebabkan industri dengan DER keseluruhan debt keseluruhan equity yang besar hendak mengalami resiko yang besar ialah industri mengalami bahaya kekalahan penuh kewajibannya, serta aplikasi manajemen keuntungan tidak bisa dijadikan referensi buat menjauhi resiko itu.

Populasi yang digunakan dalam riset ini merupakan industri perbankan yang tertera di Bursa Efek Indonesia. Industri perbankan di Indonesia sangat penting perannya dalam perekonomian. Bank perbankan Indonesia menggenggam andil yang amat berarti dalam perekonomian. Selaku badan intermediasi finansial, bank ialah salah satu badan

finansial yang berfungsi berarti dalam perekonomian sesuatu negeri, sebab perbankan ialah salah satu sistem finansial yang berfungsi selaku financial intermediary, serta ialah badan finansial terkenal. Bersama dengan owner serta konsumen anggaran, bank wajib bekerja dengan cara berdaya guna bagus di tingkatan besar ataupun mikro. Bank juga salah satu bisnis yang unik karena banyak orang yang membagikan kepercayaan pada bank guna menabung serta melakukan kredit. Maka dari itu bank wajib mempraktikkan aturan mengurus industri yang bagus. Sebab bank sesuatu badan finansial yang aktivitas operasional nya tergantung pada anggaran yang dipercayakan oleh konsumen jasanya ataupun pelanggan.

Motivasi riset ini karena hasil – hasil riset sebelumnya yang tidak sama serta pembahasan yang lebih mendalam mengenai praktik kecurangan terhadap perbankan terkait pelaporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi.

Maka dari fenomena dan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2018-2019”.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya kasus manajemen laba yang terjadi di industri perbankan disebabkan karena pengaplikasian tata kelola industri kurang berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan timbulnya resiko dan kecurangan dalam pelaporan keuangan.
2. Mekanisme penerapan tata kelola industri (GCG) antara lain Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit pada industri perbankan belum menyadari manfaat penerapan (GCG) tersebut.
3. DER pada struktur modal pada industri perbankan yang belum stabil.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Manajemen laba diukur menggunakan model *Beaver*.
2. Prinsip GCG yang dimaksud yaitu Transparansi yang di wakikan oleh Kepemilikan Institusional, Akuntabilitas di wakikan oleh Dewan Direksi, Responsibility di wakikan oleh Dewan Komisaris, Independensi di wakikan oleh Kepemilikan Manajerial dan Kewajaran di wakikan oleh Komite Audit.
3. Struktur modal diukur dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER).
4. Objek penelitian merupakan industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2019.

## 1.6 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Struktur Modal secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
3. Apakah Dewan Direksi berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
4. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
6. Apakah Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019?
7. Apakah Struktur Modal berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba

## 1.4 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka penilit memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* dan Struktur Modal secara simultan terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.

6. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.
7. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal secara parsial terhadap manajemen laba pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2018-2019.

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian yang di lakukan peneliti ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Manfaat bagi industri perbankan

Hasil riset ini dapat memberikan manfaat bagi industri bagaimana penerapan tata kelola industri dengan baik agar industri dapat mengalami pertumbuhan yang baik. Dan juga manfaat dengan adanya struktur modal yang baik akan mengurangi resiko industri di masa yang akan datang.

2. Bagi Investor

Riset ini di harapkan berguna bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi atau pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan struktur modal pada industri.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini di harapkan berguna bagi peneliti selanjutnya yang dapat di gunakan sebagai referensi untuk mengetahui aspek – aspek lainnya yang mempengaruhi manajemen laba.